

Peranan Camat Dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi di Kantor Camat Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah)

Abstract. *Head position as a leader in the sub Batukliang north and at the same time as the head of the working area have an important role and ultimately determines batukliang Good governance in the northern districts, but in truth good governance is already optimally realized in Batukliang northern districts. This study aims to determine how camat role in ensuring good governance in the sub Batukliang utara Kabupaten central Lombok.*

The method used is a qualitative method. Camat role in achieving good governance aspects of the view, that plan manage, control and coordinate all activities of the organization of general duty of government and regional government authority delegated by the Regent. informants in this study as many as four people taken from officials of sekretaris camat, subsections of government, public and kepegawaian subsections village government representatives. the key instrument in this study is the researchers themselves, while collecting data using interview techniques. The results of data analysis aimed subdistrict governments to coordinate and supervise the activities of the government district in northern Batukliang to achieve good governance is done properly and effectively in Kecamatan Batukliang north.

Based on the results of the study concluded that the district head north batukliang already mamapu stints with both the duty and authority to coordinate and supervise the government penyelenggaraan in districts that have an important role in achieving good governance.

Departing from the conclusions of the study were submitted suggestions: camat must optimize the use of means of organizing pemerintahan coordination of all units of government; optimizing the potential and ability to provide guidance to government work units in the district work areas; and optimize the existing control facilities such as reporting systems, and monitoring and evaluation. **Keywords:** *evaluasi kinerja, kepala desa, era otonomi daerah.*

Keywords: *Role, District Head, Good Governance*

LATAR BELAKANG

Di lingkungan masyarakat, dalam organisasi formal maupun nonformal selalu ada seseorang yang dianggap lebih dari yang lain. Seseorang yang memiliki kemampuan lebih tersebut kemudian diangkat atau ditunjuk sebagai orang dipercayakan untuk mengatur orang lain. Biasanya orang seperti itu disebut pemimpin. Dari kata pemimpin itu sehingga muncul istilah kepemimpinan. Dalam kepemimpinan dibutuhkan manusia karena adanya keterbatasan dan kelebihan tertentu pada manusia. Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Selain itu juga mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa para pengikut-pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerja sama dan kerja kelompok, perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang diluar kelompok atau organisasi.

Pimpinan atau atasan merupakan orang yang paling tepat untuk mengambil inisiatif dalam usaha menciptakan hubungan yang baik diantara orang-orang yang ada dalam sebuah organisasi, karena pimpinan merupakan orang yang paling bertanggungjawab terhadap jalannya roda

pemerintahan. Menciptakan hubungan yang baik merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau lembaga karena unsur manusiawi merupakan unsur yang paling penting yang menentukan sukses tidaknya roda pemerintahan tersebut.

Konsep good governance sendiri dalam beberapa tahun belakangan ini banyak dibicarakan dalam berbagai konteks dan menjadi isu yang mengemuka dalam pengelolaan pemerintahan. Hal ini terjadi karena bagian dari luapan pola-pola lama dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah berubah atau dengan kata lain semakin tidak efektifnya pemerintahan disamping semakin berkembangnya kualitas demokrasi, hak asasi manusia dan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan. Beberapa pakar dan teoritis administrasi berpendapat bahwa peranan pemerintah harus memfokuskan pada upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat selain pemberdayaan dan pembangunan. Pemerintahan dijalankan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang terbentuk melalui diskusi yang berlangsung dalam ruang publik.

Kedaulatan rakyat sebagai sebuah konsep dasar tentang kekuasaan telah menemukan bentuknya disini. Dalam konteks ini, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan

¹Universitas Nahdlatul
Wathan Mataram

e-mail : wjannah@gmail.com

dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah, tetapi dituntut adanya keterlibatan seluruh elemen, baik interes birokrasi, masyarakat dan pihak swasta. Pemikiran hanya akan terwujud apabila pemerintahan didekatkan dengan yang diperintah atau dengan kata lain terjadi desentralisasi dan otonomi daerah. Melalui pemerintahan yang desentralistik, akan terbuka wadah demokrasi bagi masyarakat lokal untuk berperan dalam menentukan nasibnya, serta berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui pemerintahan daerah yang terpercaya, terbuka dan jujur serta bersikap tidak mengelak tanggung jawab sebagai prasyarat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan mampu memenuhi asas-asas kepatutan dalam pemerinthan (good governance).

Melalui paradigma good governance sebagai alternatif penyelenggaraan pemerintahan, potensi masing-masing stakeholders dapat di aktualisasikan dalam mengatasi berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi daerah dalam pelaksanaan otonomi daera. Sedangkan Pemerintahan Daerah, sehingga perlu dijamin perkembangan kreativitas dan aktivitas yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, demokratisasi serta kemandirian daerah (Undang- Undang No. 32 Tahun 2004)

Seiring dengan adanya keinginan mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) tersebut, maka sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di era otonomi sekarang ini, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemberdayaan, pelayanan, responsif, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kemitraan, desentralisasi, konsistensi kebijaksanaan dan kepastian hukum. Paling tidak syarat agar terciptanya good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dewasa ini seperti yang dikemukakan oleh Santosa (2008) adalah meliputi transparansi, responsive, efektif, dan efisiensi serta akuntabilitas. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan publik pada umumnya dalam upaya mewujudkan paradigma good governance yang merupakan sebagai bingkai kerja dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, tentu bukanlah hal yang mudah dalam mencapai hal tersebut. Akan tetapi dibutuhkan suatu tekad yang kuat dari berbagai stakeholders untuk mewujudkannya.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan di kecamatan batukliang utara. Lokasi penelitian sebagian besar berada di kecamatan batukliang utara kabupaten lombok tengah. Sedangkan situs penelitian merupakan tempat dimana penulis melakukan penelitian dengan mengkaji adanya fenomena yang ada. Dalam perspektif penelitian ini lokasi-lokasi yang didatangi peneliti Kantor Camat Batukliang Utara. Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan : Kondisi lingkungan relatif stabil. Lokasi penelitian mudah di jangkau baik dari segi geografi maupun secara praktis seperti : waktu, biaya, dan tenaga Situs Kantor Camat Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. Kantor Kepala Uruasan Pemerintahan Camat Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. Kantor Bagian Umum

Camat Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. Masukan dari data berupa data sekunder dan data primer, sesuai fokus penelitian yang telah ditetapkan. Data sekunder yang dibutuhkan berupa dokumen resmi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengakuan keberadaan para penyandang disabilitas dalam perspektif pelayanan prima. Untuk mengawal, memperkuat dan memperjelas data sekunder tersebut akan ditambah dengan masukan data primer hasil wawancara dengan pegawai kantor camat.

HASIL PENELITIAN

Pada lingkup pemerintahan kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Begitu pula pada pemerintah Kecamatan batukliang utara, dimana dalam menjalankan kepemimpinan pemerintah dipimpin oleh Camat Batukliang Utara yang menunjukan berbagai macam peran sebagai seorang pemimpin didalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, khususnya dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan pada Kantor Kecamatan Batukliang Utara. Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) sangat ditentukan peran pemimpin, karena pemimpin adalah pendesain sebuah kegiatan sebelum dilaksanakan oleh bawahan. Hal ini menunjukan bahwa pemimpin adalah representasi dari sebuah wilayah yang dipimpinnya, dimana maju mundurnya sebuah daerah tertentu berada pada kreatifitas seorang pemimpin. Begitu pula di sebuah Kecamatan Batukliang Utara juga terjadi hal demikian. Didalam penelitian ini akan dideskripsikan beberapa peran yang dilakukan oleh Camat Batukliang Utara meliputi : Peran Camat Dalam Pengambilan Keputusan, Peran Camat Dalam Membangun Tim Dan Peran Camat Dalam Memberikan Motivasi. Ketiga aspek tersebut diperlukan untuk mensinergikan orientasi pemerintahan yang ideal. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan mengenai peran camat tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Peranan Camat dalam Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan proses memilih diantara alternatif-alternatif tindakan untuk mengatasi sebuah masalah. Fokus pengambilan keputusan terletak pada metode serta kemampuan yang digunakan dalam pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin dalam hal ini adalah Bapak Camat Batukliang Utara.

Wawancara dengan Kaharudin S.Sos,MM selaku sekretaris Camat Batukliang Utara terhadap tata cara yang digunakan camat batukliang utara dalam pengambilan keputusan pada tanggal 04 agustus 2016 sebagai berikut:

“saya sebagai bagian dari sistem pemerintahan kecamatan, menganggap bahwa Camat Batukliang Utara sudah tepat dalam tata cara pengambilan keputusan, karena dalam setiap pengambilan keputusan camat selalu memperhatikan berbagai instrumen, seperti kepentingan bersama”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tata cara yang digunakan Camat Batukliang Utara dalam mengambil keputusan sudah baik. Karena setiap keputusan yang diambil sudah merupakan

kepentingan bersama antara seluruh pegawai kantor Kecamatan Batukliang Utara dengan tidak menyampingkan kepentingan masyarakat.

Wawancara dengan Bapak Sakirman, S.Sos Kepala Seksi Pemerintahan terhadap kemampuan camat dalam pengambilan keputusan pada tanggal 25 Juli 2016 sebagai berikut:

“saya menganggap Camat sudah mampu dan matang dalam mengambil sebuah keputusan karena terbukti setiap kali ada musyawarah tidak ada yang merasa tidak puas dengan hasil keputusan”.

Sehingga dapat disimpulkan dari uraian hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kemampuan Camat Batukliang Utara dalam pengambilan keputusan sudah baik. Tentunya ini hal yang bijaksana karena pemimpin dalam setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan yang namanya kemampuan, sikap dan tanggapan bawahan agar bawahan juga menikmati dan menerima setiap keputusan yang diberikan oleh pemimpin dalam hal ini adalah seorang Camat.

2. Peranan Camat dalam Membangun Tim Kerja.

Wawancara dengan Bapak Kaharudin, S.Sos.MM Selaku sekretaris Camat Batukliang Utara selalu mengadakan konfirmasi terlebih dahulu kepada bawahannya, hal ini terbukti dengan apa yang diungkapkan oleh Sekretaris Camat Batukliang Utara dalam wawancara langsung tanggal 04 agustus 2016 yaitu sebagai berikut :

“Camat batukliang utara dalam melaksanakan tugasnya sebelum membangun tim dalam suatu kesempatan biasanya melakukan konfirmasi dan koordinasi kepada pegawai dan meminta persetujuan kepada pegawai agar proses dalam membangun tim dapat selalu berjalan dengan baik sesuai dengan kesepakatan pegawai”.

Dari hasil wawancara di atas mengatakan bahwa camat selalu mengadakan konfirmasi dan koordinasi terlebih dahulu kepada pegawai sebelum melakukan pembentukan tim dalam suatu proses pekerjaan, misalnya dalam menangani permintaan pendaftaran KTP, kartu Keluarga dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat.

3. Peranan Camat dalam Memberikan Motivasi

Wawancara dengan Bapak L.Basuki wiyarto, BA Selaku Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mengenai kesempatan yang di berikan camat batukliang utara kepada para pegawai untuk mengembangkan diri melalui kursus pada tanggal 26 Juli 2016, mengatakan sebagai berikut :

“ Camat Batukliang Utara memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk mengikuti kursus karena dengan demikian para bawahannya atau pegawai dapat mengembangkan kualitasnya masing- masing”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa camat batukliang utara memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengembangkan diri melalui kursus.

Wawancara dengan Bapak Kaharudin, S.Sos.MM Selaku sekretaris Camat Batukliang Utara mengenai kesempatan yang

diberikan oleh camat batukliang utara kepada para pegawai untuk mengembangkan diri melalui diklat pada tanggal 04 agustus 2016, beliau mengemukakan sebagai berikut :

“Camat batukliang utara sangat mengapresiasi pengembangan diri melalui Diklat karena hal tersebut merupakan instrumen yang digunakan oleh negara untuk memperbaiki kualitas pegawai ataupun pengembangan karir pegawai di Indonesia”.

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan bahwa diklat merupakan hak setiap pegawai yang telah memenuhi syarat tertentu, sehingga Camat batukliang utara sebagai pimpinan harus memberikan kesempatan kepada para pegawai dalam rangka mengembangkan diri melalui pelaksanaan Diklat.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa camat batukliang utara memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengembangkan diri melalui diklat.

PERANAN CAMAT DALAM MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

1. Transparan

Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. mTransparansi akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik. Olehnya itu untuk menilai peranan camat dalam mewujudkan good governance pada transparansi yang diajukan kepada responden dapat dilihat pada beberapa hasil wawancara yang relevan berikut.

Wawancara dengan Bapak Kaharudin, S.Sos.MM Selaku Sekretaris Camat Batukliang Utara tentang peran camat dalam transparansi di kantor camat batukliang utara pada tanggal 04 agustus 2016, beliau mengungkapkan sebagai berikut :

“Camat Batukliang Utara sebagai pimpinan di kantor ini terbuka dalam memberikan informasi kepada siapa-siapa yang membutuhkan informasi tersebut”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peranan camat terkait dengan transparansi di kantor Kecamatan

Batukliang Utara dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah dapat dikatakan terbuka.

2. Partisipasi

Partisipasi adalah perilaku yang ditunjukkan dengan memberikan kesempatan kepada anggota organisasi/bawahan untuk ikut serta dalam menetapkan tujuan, membuat keputusan dan mendiskusikannya kebijakan- kebijakan yang akan diterapkan nantinya. Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan dan memberdayakan orang-orang yang dipimpinya, baik dalam ke ikut sertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Keikut sertaan pemimpin harus tetap dalam fungsi sebagai pemimpin dan bukan pelaksanaan. spek yang merupakan cirri-ciri dari pemerintahan yang baik dan bersih: Adanya partisipasi (Participation) Semua warga negara berhak terlibat dalam keputusan, baik langsung maupun center for public harus diikuti dengan berbagai aturan sehingga proses sebuah usaha dapat dilakukan dengan baik dan efisien, selain itu pemerintah juga harus menjadi public server dengan memberikan pelayanan yang baik, efektive, efisien, tepat waktu serta dengan biaya yang murah, sehingga mereka memiliki kepercayaan dari masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat berperan besar dalam pembangunan, salah satunya diwujudkan dengan pajak.

Sehubungan dengan hal diatas maka partisipasi Camat Batukliang Utara dalam setiap urusan pengambilan keputusan diharapkan sesuai dengan harapan yang ideal yakni mengikut sertakan semua elemen bawahannya dalam pengambilan keputusan tersebut. Olehnya itu untuk menilai peranan Camat Batukliang Utara dalam mewujudkan Good Governance pada partisipasi dapat dilihat pada tanggapan responden atau hasil wawancara dengan bapak bagian kepala seksi pemerintahan.

Wawancara dengan Bapak Sakirman S.Sos selaku Kepala seksi Pemerintahan tentang partisipasi camat batukliang utara dalam setiap mengambil keputusan pada tanggal 25 Juli 2016 sebagai berikut :

“Sebagai seorang pemimpin camat batukliang utara selalu berpartisipasi dalam proses perumusan atau pengambilan keputusan yang diperuntungkan bagi bawahan dan masyarakat”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan Camat Batukliang Utara selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan dikantor batukliang utara.

3. Daya Tanggap

Aparat pemerintah harus cepat tanggap terhadap perubahan situasi atau kondisi mengakomodasi aspirasi masyarakat serta mengambil prakarsa untuk mengatasi berbagai masalah yang dihasapi oleh masyarakat Pemerintah yang baik harus

memiliki sifat yang cepat tanggap terhadap setiap permasalahan yang terjadi dan jangan pernah mementingkan kepentingan pribadi dan golongan dengan mengabaikan kepentingan bangsa demi kepentingan pribadi. Aspek yang merupakan ciri-ciri dari pemerintahan yang baik dan bersih: Asas responsif adalah bahwa pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat secara umum. Pemerintah harus memenuhi kebutuhan masyarakatnya, bukan menunggu masyarakat menyampaikan aspirasinya, tetapi pemerintah harus proaktif dalam mempelajari dan mengalisa kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Jadi setiap unsur pemerintah harus memiliki dua etika yaitu etika individual yang menuntut pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas profesional. Dan etika sosial yang menuntut pemerintah memiliki sensitifitas terhadap berbagai kebutuhan publik.

Untuk menilai peranan Camat dalam mewujudkan good governance dalam hal cepat tanggap pemerintah Kecamatan batukliang utara yang diajukan kepada responden dapat dilihat pada hasil wawancara dengan Bapak Kaharudin S.Sos, MM Selaku Sekretaris Camat Batukliang Utara tentang peranan camat batukliang utara dalam memberikan tanggapan terhadap masalah yang terjadi di wilayah kerja pada tanggal 04 agustus 2016 yaitu :

“Setiap kegiatan yang ada dikecamatan Batukliang Utara ini Camat selalu reaksi apalagi misalnya ada permasalahan-permasalahan kerja dilingkungan kerjanya, beliau akan cepat turun tangan”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jelas, bahwa Camat Batukliang Utara selalu cepat tanggap dalam setiap permasalahan diwilayah kerjanya.

4. Pertanggung Gugatan

Tata pemerintahan yang bertanggung gugat/bertanggung jawab(akuntabel), Instansi pemerintah dan para aparaturnya harus dapat mempertanggung jawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Demikian halnya dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan.aspek yang merupakan ciri-ciri dari pemerintahan yang baik dan bersih: Yaitu pemerintah harus berdaya guna dan berhasil guna. Kriteria efektivitas biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Sedangkan asas efisiensi umumnya diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Semakin kecil biaya yang dipakai untuk mencapai tujuan dan sasaran maka pemerintah dalam kategori efisien.

Wawancara dengan Sekretaris Camat Batukliang Utara tentang peranan camat dalam pertanggung gugatan/pertanggung jawaban terhadap kegiatan dikantor camat batukliang utara pada tanggal 04 agustus 2016 yaitu sebagai berikut :

“sebagai seorang pimpinan Camat Batukliang Utara selalu mempertanggung jawabkan hal-hal apa yang menjadi kegiatan di Kecamatan batukliang utara ini dan Kecamatan ini merupakan Kecamatan yang paling aktif di Kabupaten Lombok tengah”

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan Camat Batukliang Utara terkait dengan pertanggung gugatan sangat baik.

5. Supermasi Hukum

Tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, Wujud nyata prinsip ini mencakup upaya penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum, serta pengembangan budaya hukum. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan menggunakan aturan dan prosedur yang terbuka dan jelas, serta tidak tunduk pada manipulasi politik. aspek yang merupakan ciri-ciri dari pemerintahan yang baik dan bersih: Penegakan hukum adalah pengelolaan pemerintah yang profesional dan harus didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa. Penegakan hukum sangat berguna untuk menjaga stabilitas nasional. Karna suatu hukum bersifat tegas dan mengikat. Perwujudan good governance harus di imbangi dengan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum yang mengandung unsur-unsur: supremasi hukum, kepastian hukum yang konsisten dan nondiskriminatif, hukum yang responsive, penegakan hukum, independensi.

Wawancara dengan bapak Kaharudi S.Sos, MM Selaku Sekretaris Camat Batukliang Utara tentang peranan camat dalam ketaatan hukum yang berlaku pada tanggal 04 agustus 2016 yaitu sebagai berikut :

“saya menganggap bahwa Camat Batukliang Utara sudah pada koridor yang tepat dalam ketaatannya terhadap hukum yang berlaku dan Camat Batukliang Utara merupakan Camat yang patuh kepada Hukum”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Camat Batukliang Utara dalam menjalankan tugasnya sudah taat pada hukum yang berlaku meskipun ada juga responden yang menganggap bahwa Camat Batukliang Utara tidak taat pada hukum yang berlaku dan ini merupakan alasan yang bersifat subyektif.

Wawancara dengan bapak Muhammad selaku kepala dusun benjor kecamatan batukliang utara pada tanggal 31 oktober 2016 sebagai berikut:

“Transparan, camat batukliang utara selalu melibatkan pendapat masyarakat dalam mengambil setiap keputusan yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan perkembangan atau kemajuan daerah kecamatan.”

Wawancara dengan bapak rumli selaku kepala dusun ketangga kecamatan batukliang utara pada tanggal 31 oktober 2016 sebagai berikut:

“Partisipasi, sebagai pemimpin daerah kami,sering terlibat dalam kegiatan sosial kemanusiaan selalu terjun langsung kelapangan untuk melihat kondisi pertanian kami.”

Wawancara dengan bapak Moh.Ifkan,SPd selaku kepala desa teratak kecamatan batukliang utara pada tanggal 31 oktober 2016 sebagai berikut

“Daya tangkap, sebagai masyarakat kami sangat senang dipimpin oleh beliau karna beliau sangat tanggap terhadap permasalahan- permasalahan yang kami alami mulai dari permasalahan kecil sampai permasalahan yang komplik,bukti kecil beliau tidak segan mendiskusikn pemerintahan dengan masyarakat.”

Wawancara dengan bapak Moh.Ifkan,SPd selaku kepala desa teratak kecamatan batukliang utara pada tanggal 31 oktober 2016 sebagai berikut

“Pertanggung gugatan, camat batukliang utara sangat bertanggung jawab dengan semua kebijakannya buktinyata dari hal tersebut adalah beliau selalu mengevaluasi program-program kerja yang telah direncanakan dengan melibatkan peran masyarakat setempat.”

Wawancara dengan ibu Saminah selaku masyarakat benjor kecamatan batukliang utara pada tanggal 31 oktober 2016 sebagai berikut:

“Supermentasi hukum, camat batukliang utara sangat menjunjung tinggi hukum,baik hukum tata Negara maupun hukum adat karna sebagai masyarakat saya mengamati belum ada kasus korupsi yang tidak diusut tuntas dan beliu pribadi yang santun,ramah dan berwibawa.”

KESIMPULAN

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah Camat Batukliang Utara telah melaksanakan berbagai peranannya sebagai seorang pemimpin yang ditinjau dari segi pengambilan keputusan, dalam membangun tim, serta dalam memberikan motivasi, yang kenyataannya dapat dilihat dari besarnya presentase data responden yang telah diolah. Hasilnya adalah Camat Batukliang Utara dianggap sudah mampu menjalankan peranya sebagai pimpinan dalam hal mengambil keputusan, dalam membangun tim, serta dalam memberikan motivasi kerja bawahanya. Peranan Camat Batukliang Utara dalam mewujudkan good governance yaitu transparansi, partisipasi, daya tanggap, pertanggung gugatan dan supremasi hukum. Berdasarkan penelitian ini menunjukan bahwa baik dalam partisipasi, transparansi, daya tanggap, pertanggung gugatan, dan supremasi hukum, Camat Batukliang Utara telah mampu mewujudkan prinsip Good Governance meskipun masi terdapat kekurangan yang hanya sebagian kecil. Sumber daya manusia dalam organisasi memiliki peranan yang sangat besar untuk mewujudkan Good Governance yang lebih baik lagi khususnya di kantor Kecamatan Batukliang Utara.

SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut di atas peneliti menyarankan : Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu memberikan dan menciptakan pelayanan yang baik pula kepada masyarakat, untuk itu diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Perlunya peningkatan pemahaman pegawai tentang asas-asas penggunaan tenaga dan pikiran melalui pemanfaatan dan pencontohan melalui penyuluhan. Perlunya pemerintah lebih

memperhatikan/mempertimbangkan tentang pegangkatan Camat diwilayah tersebut agar lebih memenuhi persyaratan-persyaratan kualitatif baik dari segi pendidikan, pengalaman dan kemampuan- kemampuan individual. Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Camat, hendaknya pemerintah kota dapat memberikan penghargaan kepada para camat yang berprestasi dalam menjalankan tugas-tugasnya sehingga akan memberikan semangat bagi para camat untuk berprestasi. Perlunya juga dilakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi peranan pimpinan.

DAFTAR PUSTAKA

Anindita, P.L. 2015. Pengelola media sosial dalam mewujudkan good governance (studi kasus Pengelolaan Media Sosial LAPOR! sebagai Sarana Aspirasi dan Pengaduan Rakyat secara Online Oleh Deputi I Kantor Staf Presiden).

Amir Akbar. 2014. Peranan Camat dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Studi pada Kantor Camat Kusambi Kabupaten Muna.

Badudu, J.S. dan Sutan Muhammad Zain. 2001. Kamus Umum Bahasa Indonesia.: Pustaka Sinar Harapan

Basri, 2007. Kepemimpinan yang Baik dalam Mewujudkan Good Governance. Jakarta: Bina Rupa Aksara.

Hasibuan. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

Hendry Sayahrial .2015. Desain reformasi birokrasi dan relevansinya dengan pelaksanaan good governance (studi implementasi kebijakan reformasi birokrasi kementerian bumhri).

Koentjaraningrat. 1991. Pemimpin dalam Organisasi. Jakarta: Politea.

Kartono. 2011. Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Kartini. 2011. Perilaku Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Matthew B. Miles dan Michael A. Hubberman, Metode Penelitian Kualitatif, UI Press, Jakarta, 2009.

Mayu, Uspita. 2009. Skripsi (Penerapan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) pada Pemerintahan Kelurahan di Kecamatan Kendari Kota Kendari). Kendari: FISIP UHO.

Muhammad faisal, Pengaruh pemahaman good governance dan independensi terhadap kinerja auditor pemerintah (Studi pada Auditor di BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan).

Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja. Mulyadi. 2009. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih. Jakarta: Bina Rupa Aksara.

Mulyadi. 2010. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Phradiansah. 2012. Skripsi (Penerapan Prinsip Good Governance pada Pemerintahan Konawe (studi pada

Kantor Camat Konawe Kab. Konawe)). Kendari: FISIP UHO.

Rivai, Veithzal. 2010. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Jilid II. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rivai, Veithzal. 2009. Perilaku Organisasi dan Teori Kepemimpinan Jilid II. Jakarta: PT. Salemba.

Robbins, 2001, Pemimpin dan Kepemimpinan, Terjemahan Mar'at, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Roman. 2008. Peran Kepemimpinan dalam Pengambilan Putusan. Jakarta: Rineka Cipta.

Santoso, Pandji. 2009. Teori dan Aplikasi Good Governance. Jakarta: Rafika Aditama.

Siagian, Sondang P. 1997. Teori dan Praktek Kepemimpinan. Jakarta: Rineka Cipta.

Shinta Tomuka. 2015. Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di kecamatan geria kota bitung (studi tentang pelayanan akte jual beli)

Sugiono. 2003. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.

Soejito, Irawan. 1990. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta: Rineka Cipta.

Syaukani HR. Afan Gaffar dan Ryas Rasyid. 2002. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Terry, George. R, 2001, Principles of Management, Richard D. Irwin Homewood

Illionis di download dari :<http://www.geocities.com>. Thoha, Miftah. Perilaku Organisasi. Jakarta: Rajawali Pers

Witular, Erna. 2005. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Jakarta: Gunung Agung.